

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang berasal dari penelitian yang dilakukan seseorang sebelumnya tentang topik atau masalah dalam penelitian ini. Teori dan konsep yang ada pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan konteks tata kelola perkotaan atau *urban governance*, *good urban governance* dan juga program KOTAKU. Berikut adalah tinjauan pustaka terkait konsep dan teori yang berasal dari penelitian sebelumnya:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori/Konsep Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muchlas M.Tahir. <i>Good Urban Governance: peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar</i> ¹	Deskriptif kualitatif <i>Good urban governance</i>	Pada hasil penelitian ini peran dari pemerintah dalam menjalankan konsep GUG di kecamatan Tamalanrea tidak terlaksana dengan baik hal tersebut berdasarkan efektifitas dan efesiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta ketelibatan masyarakat.
2.	Amin Pujiati Dkk. Kontribusi kepemimpinan dan tata	Deskriptif kuantitatif Tata kelola perkotaan	Kesimpulan yang ditarik penulis adalah kontribusi kepemimpinan kota terhadap keberlanjutan

¹ Muchlas M. Tahir *Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar* Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015

	kelola kota terhadap kota berkelanjutan ²		kota sebesar 18,33% dan tata kelola kota sebesar 18,92%. Berdasarkan persepsi masyarakat kepemimpinan di Kabupaten Grobogan masuk kriteria baik sedangkan tata kelola cukup baik. Berdasarkan data obyektif kepemimpinan di Kabupaten Grobogan masuk kriteria sangat baik sedangkan tata kelola masuk kriteria baik..
3.	Sulista yuniati dan sugi rahayu. Peningkatan kualitas permukiman melalui program kota tanpa kumuh di kabupaten wonosobo ³	Deskriptif kualitatif Evaluasi program	Pelaksanaan program yang dilihat dari dimensi konteks, input, proses dan produk sudah terlaksana dengan optimal. Akan tetapi, dari evaluasi pencapaian sasaran program untuk menuju nol persen hektar kumuh sampai akhir tahun 2017 masih belum maksimal yang dilihat dari kurun waktu tahun 2019 yang harus mencapai nol persen luasan kumuh.
4.	Aji Ratna, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Deskriptif kualitatif Partisipasi	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU belum bisa maksimal karena masyarakat tidak

²(Pujiati et al., 2017)

³ Yuniati, S., & Rahayu, S. (2018). Peningkatan Kualitas Pemukiman Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Wonosobo. *E-Journal Administrasi Negara*, 2(1), 660–676.

	(studi tentang program pembangunan drainase dan sanitasi di kelurahan teritip kota balikpapan) ⁴		terlibat penuh terhadap pelaksanaan program kotakku akan tetapi pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat terlibat dalam merawat dan memelihara pembangunan yang ada.
5.	Andi Muhamad Bathari Dkk. Implementation of the KOTAKU Program: Case Study in Kendari(Bathari et al., 2018) ⁵	Deskriptif kualitatif Implementasi	Implementasi program KOTAKU di Kota Kendari yang meliputi perbaikan sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan air bersih sudah berjalan, namun belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan target karena program 100-0-100 dan target bebas kumuh ditahun 2019 belum dicapai
6.	Sri Yuliani dan Gusty Putri Dhini Rosyida. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta(Yuliani & Rosyida, 2017) ⁶	Deskriptif kualitatif Kolaborasi	Kolaborasi yang terjadi dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dimana seharusnya berjalan dengan menggunakan konsep kolaborasi sesuai dengan SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU tidak semua Prinsip Berjalan

⁴ Prof Hj, Aji Ratna, M Si, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase Dan Sanitasi Di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)', 6 (2018), 7034–48.

⁵ Bathari, A. M., Solo Limba, R., & Mustafa, L. O. (2018). Implementation of the KOTAKU Program: Case Study in Kendari. *Journal Publicuho*, 1(2), 37.

⁶ Yuliani, S., & Rosyida, G. P. D. (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 33–47

			<p>sebagaimana mestinya. Dimana dalam prosesnya prinsip Partisipasi, Komunikasi dan Berbagi belum sesuai dengan Prinsip Kolaborasi menurut SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU. Tapi prinsip Akseptasi dan Percaya sudah berjalan dalam Kolaborasi dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi.</p>
7	<p>David Tivianto Dkk. Pemberdayaan masyarakat melalui program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda⁷</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p> <p>Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program KOTAKU di Kelurahan Pelita sudah terlaksana dengan baik dan adapun kegiatan yang sudah terlaksana serta mendapat respon dan sambutan yang baik dari masyarakat, yaitu perbaikan sarana dan prasarana berupa semenisasi jalan-jalan.</p>

⁷ David Tiviyanto, Bambang Irawan, and Enos Paselle, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda', 7 (2019), 8892–8905.

8	M. intania Efektivitas program kota tanpa kumuh di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta(Intania Si, 2017) ⁸	Deskriptif kualitatif Efektifitas implemntasi lima tepat	Efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta belum dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan ada beberapa indikator Program KOTAKU yang belum dapat dipenuhi misalnya pengamanan kebakaran. Padahal ini sangatlah diperlukan mengingat Kelurahan Karangwaru memiliki jumlah penduduk yang padat
9	Sulistyaningsih, Tri Dkk. The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia (2020) ⁹	Deskriptif kualitatif Collaborative Urban Governance	Pelaksanaan Program KOTAKU terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan keberlanjutan. Setiap tahapan ini harus memberikan hasil yang baik untuk pelaksanaan program, hasil dari tahap persiapan, yaitu pembentukan PKP kelompok yang harus melaksanakan Program KOTAKU yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat. Tidak adanya pertemuan setelah PKP Kelompok

⁸ Intania Si, M. (2017). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan. *Efektivitas Program Kota*, 387–397

⁹ Sulistyaningsih, Tri Dkk. (2020) The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (KOTAKU) in Pasuruan, Indonesia *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 436

			Kerja dibentuk, menandakan bahwa PKP Kelompok Kerja tidak melakukan apa yang seharusnya tanggung jawabnya.
--	--	--	--

Sumber: Data sekunder,diolah peneliti

Berkaitan dengan literatur diatas, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan menggunakan konsep GUG terkait dengan penanganan permukiman kumuh. selain itu, permasalahan terkait permukiman menjadi kesamaan pada tiap literature diatas. Program KOTAKU juga menjadi literatur yang menjadi refrensi penulis untuk penelitian tata kelola perkotaan dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Bareng Kota Malang

Penelitian ini sendiri lebih mengarah pada aspek tata kelola perkotaan pada program KOTAKU dalam menangani pemukiamn kumuh yang ada di Kelurahan Bareng. Untuk pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu konsep *Good Urban Governance* atau tata kelola perkotaan yang baik dengan menerapkan prinsip yang ada didalamnya.

2.2 Tata Kelola Perkotaan

Permasalahan utama dalam menata kawasan perkotaan yaitu meningkatkan pelayanan wilayah kota kapasitas dalam mengelola wilayah kota yang terbatas terutama dalam mengelola sumber pendanaan, masalah sosial pada masyarakat yang meningkat di wilayah kota, menurunnya kualitas lingkungan di wilayah kota yang disebabkan

peningkatan permukiman kumuh, rendahnya manajemen pada lalu lintas dan angkutan umum, serta sistem penataan terhadap ruang dan lahan di kota yang masih kurang baik..¹⁰

Dalam mengelola perkotaan memiliki tantangan yang akan dialami yaitu semakin meningkatnya peran kota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, serta budaya warga kota semacam, pendidikan, perumahan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Selain itu dalam mengelola perkotaan harus terciptanya ketertiban publik dan keamanan dalam lingkungan warga kota.¹¹

Oleh sebab itu dalam menanggapi permasalahan di kawasan perkotaan diperlukan tata kelola perkotaan atau *urban governance*. Tata kelola perkotaan mengacu pada bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan memutuskan bagaimana kawasan perkotaan harus direncanakan, didanai dan dikelola. Artinya dalam mengelola kawasan perkotaan diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah, pemangku kepentingan dan juga masyarakat kota¹². Dengan adanya tata kelola perkotaan atau *urban governance* diharapkan dapat terciptanya ruang bagi pemerintah daerah dan juga keterlibatan masyarakat.

Dari beberapa aspek diatas dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian tata kelola perkotaan memerlukan sumberdaya pendanaan yang besar untuk dapat mencukupi kebutuhan kawasan kota. Hal tersebut diperlukan karena kota perlu menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya dan menciptakan wilayah yang layak huni. Selain itu yang menjadi permasalahan yang perlu ditangani di wilayah perkotaan adalah kawasan

¹⁰ Adisasmita, Rahardjo, 2010. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 147

¹¹ Ibid hal 148

¹² Edenlebos, Julian dan Meine Pieter van Dijk. Introduction: Urban governance in the realm of complexity. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/313885257>

permukiman kumuh, dibutuhkan penataan yang untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kerjasama ataupun kolaborasi dari pemangku kepentingan serta keterlibatan masyarakat.

2.3 Good Urban Governance

Tata kelola perkotaan yang baik atau *Good urban governance* (GUG) adalah sebuah konsep terkait tata kelola perkotaan berasal dari dua sumber yakni *good governance* dan *urban governance*. *good governance* ialah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan terdiri atas sejumlah bagian indikator. Akan tetapi konsep *good governance* tidak terlepas dari aspek *governance*. UNDP memiliki identifikasi dua aspek pokok dari *governance* yaitu:

- a) Secara teknis ini adalah sebuah metode untuk mengerahkan sumber daya, formulasi perencanaan, aplikasi teknis dan alokasi sumber daya
- b) Metode tersebut membutuhkan partisipasi publik, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Sementara *World Bank* sendiri melakukan identifikasi terkait 4 pilar *good governance*, yaitu tata kelola pada sector public, akuntabilitas, penegakan hukum pembangunan, informasi public dan transparansi. (Tahir, 2015) Konsep tata kelola dan tata kelola yang baik merupakan dasar penting untuk menerapkan tata kelola kota yang baik.

Good urban governance memiliki tafsiran yang berbeda dalam setiap pandangannya. Hendrik menunjukkan bahwa yang harus digaris bawahi dari nilai-nilai

¹³ Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementai Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 120

good urban governance di dasarkan pada prinsip-prinsip yang memuat *good governance*. (Hendriks, 2015) Seperti menerapkan aturan secara adil, cepat tanggap, efisien, akuntabel dan demokratis. Dalam mengelola kota agar terciptanya kota yang baik maka harus menumbuhkan rasa kepedulian tersebut ketika sedang menjalani tahap pelaksanaan.

Sementara itu, terdapat sebuah pandangan lain yang mengatakan bahwa GUG tersebut ialah sebuah kampanye yang dilakukan secara global oleh salah satu organisasi PBB yang bernama *United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat). Organisasi ini mempunyai tujuan untuk dapat mengembangkan panduan terhadap negara-negara di seluruh dunia demi mencapai pembangunan perkotaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut UN-Habitat, menciptakan pengelolaan kota yang baik dalam rangka agar dapat mengurangi angka kemiskinan dalam perkotaan agar dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mencapai pembangunan perkotaan yang memadai di suatu daerah. (Ummary et al., 2000) Maka dari itu dalam penerapan *good urban governance* tidak hanya bertujuan untuk menciptakan prasarana perkotaan dengan sesuai namun agar dapat mengupayakan angka kemiskinan dan mengembangkan kapasitas para aktor lokal agar ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kota.

Dalam penelitian ini akan menggunakan konsep GUG yang dikembangkan oleh UN-Habitat. UN-Habitat mengatakan jika tata kelola kota yang baik bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan kota. Selain itu juga konsep ini sudah sesuai dengan karakteristiknya berdasarkan kebutuhan demi menyelenggarakan tata kota yang berkelanjutan.

“Urban governance is inextricably linked to the welfare of the citizenry. Good urban governance must enable women and men to access the benefits of urban citizenship. Good urban governance, based on the principle of urban citizenship, affirms that no man, woman or child can be denied access to the necessities of urban life, including adequate shelter, security of tenure, safe water, sanitation, a clean environment, health, education and nutrition, employment and public safety and mobility. Through good urban governance, citizens are provided with the platform which will allow them to use their talents to the full to improve their social and economic conditions.”¹⁴

Secara kesimpulan menurut UN-Habitat di atas, para pemimpin atau pemerintahan kota ikut terlibat dalam melakukan promosi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tata kelola kota yang baik dapat memberikan akses kepada setiap masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak agar semuanya dapat merasakan dan menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kota setempat untuk mencukupi kebutuhan mereka. Terdapat fasilitas yang harus diberikan dalam tata kelola kota dan meliputi keamanan, air bersih, sanitasi, lingkungan yang asri, fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan bergizi, hingga pekerjaan yang layak. Ketersediaan fasilitas tersebut dapat menjamin kehidupan yang memadai untuk masyarakat. GUG juga memiliki tujuan agar dapat mengubah hingga meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

¹⁴ Ibid hal 1

2.3.1 Prinsip-Prinsip dalam Penerapan *Good Urban Governance*

Good urban governance mempunyai sejumlah prinsip yang harus diterapkan agar dapat memenuhi tujuan pengelolaan kota dengan baik, hal ini dapat dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses secara umum dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip GUG yang akan diterapkan yaitu keberlanjutan, desentralisasi, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan keamanan. Berikut ini adalah penjelasan agar dapat memahami secara mendalam mengenai prinsip *good urban governance*, yaitu

a) Prinsip Keberlanjutan

Pemerintah setempat harus mempunyai rencana yang dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang terkait dengan pengelolaan kota di daerah setempat. Prinsip ini biasanya berbentuk rencana strategis.

“Cities must balance the social, economic and environmental needs of present and future generations. This should include a clear commitment to urban poverty reduction. Leaders of all sections of urban society must have a longterm, strategic vision of sustainable human development and the ability to reconcile divergent interests for the common good”¹⁵

Dengan demikian, berarti dalam praktiknya untuk penerapan *good urban governance*, pemerintah setempat perlu mempunyai rencana yang dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang terkait dengan pengelolaan kota di daerah setempat. Prinsip ini biasanya berbentuk rencana strategis.

¹⁵ UN-Habitat. 2002. The Global Campaign for Good Governance

Secara praktis dalam penerapan prinsip keberlanjutan ini tentunya harus ada komunikasi yang dilakukan antar stakeholder, agar pemerintah setempat tidak mengambil keputusan tanpa adanya komunikasi yang dilakukan sebelumnya dengan pihak lain seperti pihak non-pemerintahan. Selain itu perencanaan yang dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang harus mencakup prinsip keberlanjutan lingkungan serta menjamin aktivitas terkait ekonomi rakyat. Agar dapat terpenuhinya harapan dari prinsip keberlanjutan *good urban governance* yang berusaha untuk mewujudkan dan menyepadankan terkait pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan kota

b) Prinsip Desentralisasi

Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap daerah/kota agar bisa melaksanakan penataan perkotaan secara optimal dan sesuai dengan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

“Decentralization and local democracy should improve the responsiveness of policies and initiatives to the priorities and needs of citizens. Cities should be empowered with sufficient resources and autonomy to meet their responsibilities.”¹⁶

Setiap kota perlu penunjang sumberdaya dan otonomi agar mampu memenuhi tanggung jawab serta otoritas dalam menjalankan prosedur pengelolaan kota. Prinsip ini juga menuntut kota untuk dapat mengoptimalkan potensi masyarakat agar semuanya dapat berperan dengan aktif dan berkontribusi saat menerapkan *good urban governance*.

¹⁶ Ibid hal 20

Secara praktis prinsip desentralisasi ini akan mengatur terjadinya pengalihan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah kota hingga dalam tataran atau level kelurahan, RW, dan RT. Hubungan dalam prinsip ini baik dari segi pemerintah pusat, pemerintah kota dan instansi bawahan serta stakeholser non pemerintahan seperti sector public dan swasta bisa berbentuk secara veritikal maupun horizontal. Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan kota dengan baik maka pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dengan cara transfer atau mengalokasikan anggaran dana hingga dukungan penuh terhadap bagian administrasi secara teknis penyelenggaraan kota.

c) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan pada konsep GUG merujuk pada kesetaraan terhadap semua sisi agar dapat menerima dan bisa merasakan manfaat dari pengimplementasian tata kelola kota.

“The sharing of power leads to equity in the access to and use of resources. Women and men must participate as equals in all urban decision-making, priority-setting and resource allocation processes. Inclusive cities provide everyone – be it the poor, the young or older persons, religious or ethnic minorities or the handicapped – with equitable access to nutrition, education, employment and livelihood, health care, shelter, safe drinking water, sanitation and other basic services.”¹⁷

¹⁷ Ibid hal 21

Penggunaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kota harus bersifat tidak diskriminatif agar memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat digunakan dan di akses oleh semua gender baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan penyandang disabilitas. GUG memperlakukan semua orang secara setara seperti memberikan standar hidup dengan menyediakan makanan, ahli gizi, pendidikan, pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi hingga layanan lainnya. Sesuai dengan prinsip ini bahwa kesetaraan setiap masyarakat akan dijamin seperti halnya dengan proses pengambilan keputusan. Tata kelola kota yang baik pastinya akan sangat memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan kesetaraan gender

d) Prinsip Efisiensi

Efisiensi pada tata kelola kota menjadi usaha untuk menyediakan layanan yang bisa diakses masyarakat umum dan mendorong pembangunan perkotaan yang sehat secara materi serta hemat biaya dalam mengelola sumber pemasukan dan pengeluaran kota

“Cities must be financially sound and cost-effective in their management of revenue sources and expenditures, the administration and delivery of services, and in the enablement, based on comparative advantage, of government, the private sector and communities to contribute formally or informally to the urban economy.”¹⁸

¹⁸ Ibid hal 22

Efisiensi tentunya memnfasilitasi dan mewajibkan dari sisi non-pemerintahan, yaitu dari segi swasta dan masyarakat untuk memberikan partisipasi secara formal ataupun informal dalam melakukan penyelenggaraan kota. Agar bisa meringankan dalam suatu pekerjaan pemerintahan yang disebut dengan sumberdaya yang terbatas. Maka dari itu, agar dapat melengkapi prinsip efisiensi dalam pengelolaan kota, pemerintah setempat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui strategi mitra dari segi swasta dan masyarakat sipil. Namun dalam hal pengelolaan manajemen dan pengelolaan sumber daya anggaran, pemerintah perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas saat mengumpulkan pendapatan perdaerah. Prinsip ini juga harus ditopang dengan diberlakukannya aturan secara hukum agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan kota hingga mampu dilakukan secara praktis.

e) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kota dapat dikatakan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Akuntabilitas otoritas lokal terhadap masyarakat menjadi perhatian yang penting sehingga tidak ada tempat untuk orang-orang melakukan tindakan tidak terpuji di wilayah pemerintahan kota.

“Transparency and accountability are essential to stakeholder understanding of local government and to who is benefiting from decisions and actions. Access to information is fundamental to this understanding

and to good governance. Laws and public policies should be applied in a transparent and predictable manner. Elected and appointed officials and other civil servant leaders need to set an example of high standards of professional and personal integrity. Citizen participation is a key element in promoting transparency and accountability.”¹⁹

Akuntabilitas dalam tata kelola kota menyatakan pemerintah setempat dapat melakukan pertanggung jawaban dari setiap tindakan yang dilakukan melalui kebijakan, program atau kegiatan tata kelola kota. Akuntabilitas didukung oleh keterbukaan fakta oleh pemerintahan kota terhadap masyarakat agar dapat mengakses berita yang terkait dengan tata kelola kota, terutama yang berhubungan layanan public yang disediakan oleh pemerintah, dikarenakan bebasnya akses berita merupakan sebuah landasan dari pemerintahan yang terbuka dan mampu untuk mengemban tanggung jawab masyarakatnya.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola kota dapat diterapkan melalui transparansi dalam melakukan tender dan pengadaan, selain itu juga bisa dengan audit oleh lembaga independen. Prinsip ini digunakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Dalam praktik pengelolaan kota, pemerintah harus mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan public agar tidak terjadi unsur pungutan liar atau yang biasanya disebut dengan pungli. Untuk menyaring aspirasi dari masyarakat, pemerintah kota bisa membuat terobosan melalui pembuatan platform yang dapat diakses semua

¹⁹ Ibid hal 23

masyarakat untuk melaporkan segala kejadian atau permasalahan kepada pemerintah kota agar hal tersebut dapat segera diatasi.

f) Prinsip Keterlibatan Masyarakat Sipil

Dalam hal ini masyarakat menjadi modal penting saat melakukan pengelolaan kota. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek namun masyarakat juga bisa berperan sebagai subjek dalam menyelenggarakan tata kelola kota

“People are the principal wealth of cities; they are both the object and the means of sustainable human development. Civic engagement implies that living together is not a passive exercise: in cities, people must actively contribute to the common good. Citizens, especially women, must be empowered to participate effectively in decision-making processes. The civic capital of the poor must be recognized and supported.”²⁰

Masyarakat harus memiliki peran yang besar agar tercapainya tata kelola perkotaan yang baik. Dengan peran masyarakat terhadap lingkungannya diharapkan ada rasa emosional untuk menjaga lingkungannya. Seperti halnya dengan tata kelola kota yang baik akan berkorelasi dengan segala aspek pembangunan manusia (*human development*). Keterlibatan masyarakat sipil dalam menerapkan *good urban governance* tidak hanya sebuah keikutsertaan pasif namun adanya keikutsertaan aktif dalam mengejar kepentingan secara bersama. Prinsip ini menegaskan kembali bahwa keterlibatan seorang perempuan

²⁰ Ibid hal 24

dalam berpartisipasi dengan efektif saat mengambil sebuah keputusan itu sangat penting.

Selain itu, dalam rangka mendukung partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan tata kelola kota, pemerintah sebaiknya menyikapi beberapa hal yang terkait dengan dukungan regulasi seperti menyelenggarakan beberapa forum yang ditujukan kepada masyarakat umum seperti *public hearing*. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut juga diperlukan adanya solidaritas dan hubungan timbal balik karena bisa saja terjadi banyak kepentingan dan ketidak sepakatan dalam memandang suatu hal antara satu sama lain.

g) Prinsip keamanan

Keamanan pada tata kelola perkotaan adalah untuk memastikan bahwa para penghuninya merasa aman dan tentram dari segala bahaya yang dapat menyebabkan penduduk setempat merasa tidak aman dan cemas. Maka dari itu, setiap kota harus melakukan upaya untuk menjauhi dan melindungi diri dari segala permasalahan yang timbul di lingkungan sekitar seperti bencana alam, kejahatan yang dapat terjadi di sekitar. Hal ini dilakukan agar penghuni kota merasa bahwa keselamatan mereka dapat terjamin.

“Every individual has the inalienable right to life, liberty and the security of person. Insecurity has a disproportionate impact in further marginalising poor communities. Cities must strive to avoid human conflicts and natural disasters by involving all stakeholders in crime and conflict prevention and disaster preparedness. Security also implies

freedom from persecution, forced evictions and provides for security of tenure. Cities should also work with social mediation and conflict reduction agencies and encourage the cooperation between enforcement agencies and other social service providers (health, education and housing). ”²¹

Keamanan pada tata kelola perkotaan yang baik mencakup beberapa tindakan khusus yang harus diperhatikan oleh lingkungan kota setempat. Kota bisa dikatakan aman ketika masyarakatnya bisa saling bekerja sama untuk menjaga lingkungannya sehingga dapat terlindung dari bencana alam dan bencana yang biasanya diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri. Selain itu juga terdapat hal krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat yaitu adanya perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala ancaman pelecehan seksual ataupun terhadap anak yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal.

Dalam melakukan perencanaan kota, prinsip-prinsip *good urban governance* dapat digunakan sebagai pedoman. Namun prinsip diatas hanya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menangani permukiman yang kumuh yang terletak di tengah perkotaan. Jika digunakan, hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep GUG. Konsep ini tidak hanya dirancang untuk mengembangkan kualitas prasarana akan tetapi juga digunakan sebagai jaminan untuk mewujudkan pembangunan permukiman yang dilakukan secara terus-terusan. Harapannya segala isu permukiman kumuh tidak hanya menjadi sorotan namun juga bisa ditangani agar terciptanya pengelolaan kota yang baik.

²¹ Ibid hal 24

2.4 Program KOTAKU

Program kota tanpa kumuh atau KOTAKU merupakan kebijakan untuk menangani permukiman kumuh secara nasional dengan mencegah serta meningkatkan kualitas permukiman. Program ini sendiri merupakan upaya strategis dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Pada pelaksanaannya, program KOTAKU mendorong pemerintah daerah untuk menjadi aktor utama dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh guna mewujudkan kawasan layak huni bagi masyarakat. Selain itu program ini juga mendorong peran masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaannya dengan merevitalisasi fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat.²²

Program kotakau merupakan program yang dijalankan di 34 provinsi 271 kabupaten/kota dengan mengintegrasikan berbagai sumberdaya dan dana guna menangani permukiman kumuh. Dengan luas permukiman kumuh 35.291 Ha program KOTAKU diharapkan dapat mengatasi hal tersebut secara bertahap melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan juga masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperbaiki infrastruktur dan layanan publik.

Pada kebijakan KOTAKU dalam membangun infrastuktur harus berdampak kepada pengurangan kawasan kumuh. kegiatan ini juga harus memperhatikan pendanaan dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya agar tepat sasaran. Selain itu diperlukan juga bantuan sumberdaya yang berasal dari masyarakat. Bentuk sumberaya dari masyarakat bisa berupa keuangan, konsumsi, lahan tenaga ataupun hal penunjang lainnya. Karena pada dasarnya pelaksanaan program ini

²² Pedoman Umum, *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*, (Direktorat Jendral Cipta Karya). Hlm. 8-9

memerlukan keterlibatan yang aktif dari masyarakat. Selain itu pula masyarakat harus terlibat dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan yang mana didalamnya ada monitoring dan evaluasi. Pentingnya peran masyarakat terhadap pelaksanaan program ini juga agar dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan yang ada. Dengan keterlibatan masyarakat pada tiap prosesnya maka diharapkan transparansi dapat terwujud. Selain pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU, pembangunan infrastruktur juga harus berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.²³

Permukiman kumuh sendiri merupakan wilayah yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh bangunan yang tidak teratur, padatnya pada bangunan tersebut, serta mutu dari bangunan. Selain itu tidak terpenuhinya kelayakan pada sarana dan prasarana. Sementara untuk perumahan kumuh adalah tempat tinggal yang berkurang kualitas fungsinya sebagai tempat tinggal. Adapun ciri-ciri perumahan kumuh serta permukiman kumuh dari segi fisik adalah Wujud bangunan rumah dan permukiman, bangunan yang tidak memenuhi syarat, tidak beraturan, tingginya kepadatan bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak layak. Untuk sarana dan prasarana sendiri memiliki batasan berdasarkan bidang keciptakaryaan. Batasan tersebut seperti jalan, drainase, ketersediaan air bersih, keamanan untuk bencana khususnya kebakaran ruang terbuka untuk masyarakat umum, serta pengelolaan sampah dan limbah.

Dari segi fisik tersebut yang kemudian menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator permukiman kumuh saat menentukan lokasi permukiman kumuh dan hunian kumuh. Selain dari segi fisik, perlu juga dilakukan identifikasi ciri non fisik seperti

²³Rohayati,Iroh.2001. *Peduli untuk mandiri*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta. Hlm.3

karakter masyarakat, kejelasan bertempat tinggal, kejelasan dalam berbisnis, dan lainnya..²⁴

Dalam meningkatkan kualitas dan mencegah permukiman kumuh pada tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui kolaborasi pendanaan investasi (BDI) dan bantuan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Kolaborasi BDI diberikan kepada kabupaten / kota yang dipilih tetapi dana BDI disalurkan langsung ke kelurahan sesuai dengan pedoman teknis pencairan dan pemanfaatan bantuan dana investasi. Pemerintah daerah dan masyarakat akan menyetujui kriteria untuk menentukan kelurahan yang akan menerima kolaborasi BDI. BDI PLBK akan diberikan oleh pemerintah pusat ke wilayah terpilih yang memenuhi kriteria

2.4.1 Tujuan Program

Program kotakumuh memiliki tujuan yaitu akses terhadap infrastruktur yang meningkat dan layanan dasar pada wilayah kumuh kota guna mendorong realisasi terhadap permukiman kota yang baik untuk dihuni, produktif, dan berkelanjutan. Adapun pencapaian tujuan diukur melalui indikator (outcome) sebagai berikut:²⁵:

- 1) Akses publik infrastruktur dan lingkungan yang meningkat.
- 2) Area permukiman kumuh yang berkurang.

²⁴ Sinulingga, Budi D. 2005. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hlm.230

²⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Jakarta, 2016, hlm. 4

- 3) Kepuasan dari penerima manfaat dengan meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan.
- 4) Kesejahteraan masyarakat yang meningkat dengan mendorong mata pencaharian di daerah kumuh.
- 5) Terciptanya kesepakatan bersama dalam upaya mengubah perilaku masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih.

2.4.2 Strategi Program KOTAKU

Dalam pengimplementasiannya program kotak memiliki strategi dasar dan strategi operasional. Strategi dasar yang ada pada program kotak adalah kolaborasi antar actor dalam melakukan penanganan permukiman kumuh. Sedangkan strategi operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Menangani permukiman kumuh dengan pencegahan dan meningkatkan kualitas permukiman .
- 2) Peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi yang dapat berkolaborasi serta membangun kerjasama antar pusat hingga ke masyarakat guna menangani permukiman kumuh
- 3) Melaksanakan perencanaan dan penganggaran Partisipatif dan penganggaran terpadu berasama multi-aktor dan multi-sektor.
- 4) Menetapkan rencana penanganan wilayah kumuh termasuk didalam agenda RPJMD dan perencanaan lainnya..
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam penggunaan data yang ada dan merencanakan produk, termasuk dalam kasus penyelesaian data dasar (baseline) yang akan digunakan sebagai referensi umum dalam perencanaan dan pengendalian.

- 6) Meningkatkan akses ke layanan lingkungan dasar yang terintegrasi dengan sistem kota.²⁶

2.4.3 Prinsip dari Program KOTAKU

Pelaksanaan program KOTAKU memiliki prinsip dasar sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah menjadi nakhkoda, artinya yang memimpin kegiatan penanganan kumuh ini adalah pemerintah daerah dan kelurahan atau desa dengan berkolaborasi antar stakeholders serta partisipasi dari masyarakat.
- b) Perencanaan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil (pencapaian tujuan program). Permukiman kumuh ditangani melalui mindset yang komprehensif dan mengarah pada capaian tujuan
- c) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Penangan permukiman kumuh disinkronisasikan pada perencanaan dan penganggaran sesuai dengan visi kabupaten/kota pada RPJM daerah
- d) Partisipatif. Pembangunan partisipatif dengan menggabungkan perencanaan dari atas (top-down) serta dari bawah (bottom-up).
- e) Kreatif dan Inovatif. Yang dimaksud kreatif pada konteks ini adalah kemampuan dalam pengembanagan gagasan dalam mengatasi masalah dan mendapatkan peluang guna menangani pumkiman kumuh.
- f) Pengelolaan lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan. Program KOTAKU mesti memiliki prinsip keberlanjutan pada pembangunannya.

²⁶ *Ibid.*, hlm 5-6

- g) Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Hal tersebut memiliki tujuan agar penanganan permukiman kumuh dapat meningkatkan kapasitas dari pemerintah daerah, kelurahan/desa serta masyarakat dalam melaksanakan dan mengelola secara mandiri pembangunan diwilayahnya.
- h) Investasi dalam menangani kawasan kumuh harus bisa mendorong pengembangan kota dalam meningkatkan kapasitas serta menjadi upaya dalam mendukung lingkungan.
- i) Revitalisasi peran BKM, Penekanan peran BKM yang awalnya menangani masalah kemiskinan menjadi mencegah dan meningkatkan kualitas kawasan kumuh.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm 6.